



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

2019

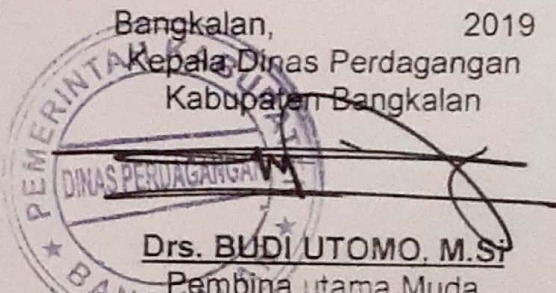
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan Review atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 dan telah di review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi kabupaten Bangkalan **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Yang Religius Dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal"** berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan NomorTahun 2019.

Semoga dengan telah tersusunnya atas RENSTRA PD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin, baik dari aspek pengukurankinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan. kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renstra ini.

Bangkalan, 2019
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bangkalan

Drs. BUDI UTOMO, M.Si
Pembina utama Muda
Nip. 19610226 198203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.....	7
2.2	Sumber Daya Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan...	20
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan.....	23
	– Tabel 2.1 (Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	
	– Tabel 2.2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan	
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.....	25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.....	29
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	30
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	32
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan
– Tabel 4.1 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perdagangan)..... 46

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten
Bangkalan
– Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Perdagangan 48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel 71. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD..... 50

BAB VIII PENUTUP..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup :

- a) analisis gambaran pelayanan;
- b) analisis permasalahan ;
- c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya ;
- d) analisis isu strategis ;
- e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
- f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah ;

- g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan.

Tema pembangunan Kabupaten Bangkalan adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Yang Religius Dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal"**.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan akan menjadi pedoman dalam merumuskan dalam Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Perdagangan setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 ini berpedoman pada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 – 2009.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D).
10. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.
11. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 26 tahun 2016 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah kabupaetn Bangkalan tahun 2009 nomor 4/E)
15. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 nomor 1/D)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 1 tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 nomor)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 22 April 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah di bidang Perdagangan
- b. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang Perdagangan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bangkalan ke dalam rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.
- c. Menyeraskan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan pada dinas perdagangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
- b. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
- c. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan Dinas perdagangan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS

PERDAGANGAN

- A. Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
- B. Sumber Daya Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
- C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 - Tabel 2.1 (Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan)
 - Tabel 2.2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan)
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 - Tabel 4.1 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 - Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dibentuk berdasarkan : Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perdagangan. Secara normatif, Dinas Perdagangan ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten bidang Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah :

Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 2. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 3. Seksi Pembinaan dan Promosi.
- d. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, membawahi ;
 1. Seksi Metrologi;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 1. Seksi Retribusi;
 2. Seksi Ketertiban Pasar;
 3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- i. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- j. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 'berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- k. Masing-masing Seksi dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Kepala Bidang.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
Drs. BUDI UTOMO, M.Si
19610226 198203 1 007

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

SUBBAG. PERENCANAAN & KEUANGAN
DELLY SEPTIANA, SE
19760910 200312 2 005

SUBBAG. UMUM & KEPEGAW.
DESY SILVIANA, SE
19821203 200903 2 001

BIDANG USAHA PERDAGANGAN
R. M. ILYAS SANTOSO, SE
19621102 198211 1 001

BIDANG METROLOGI & PERL. KONSUMEN
NURBAIDAH, SH
19691122 199403 2 007

BIDANG PENGELOLAAN PASAR
SUTANTO, S.Sos
19631011 198503 1 012

SEKSI PENGADAAN & PENYALURAN
SITI FITRIYAH, SE
19770721 200801 2 011

SEKSI METROLOGI
ASHADI FIRMANSYAH, ST
19830114 201001 1 022

SEKSI RETRIBUSI
ERWIN YOESEOF, SE
19790504 200604 1 021

SEKSI USAHA & SARANA PERDAGANGAN
HUZAIMAH, SE., MM
19770417 200312 2 005

SEKSI PENGAWASAN BARANG & JASA
SITI HOTIMAH, S.Sos
19620303 198603 2 010

SEKSI KETERTIBAN PASAR
SRI WAHYUNI RAHMAWATI, SE
19680902 200604 2 008

SEKSI PEMBINAAN & PROMOSI
ADAM NURGUSTI ATMAJA, SH
19830812 201101 1 002

SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
SUGIARTO, B.Sc
19610706 198503 1 022

SEKSI KEBERSIHAN & PEMELIHARAAN
AGUS SUCIPTO, SE
19750818 200604 1 014

UPT

Tugas Pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan pada Unit Kerja Dinas Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perdagangan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

- daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - h. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - j. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja;
 - l. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - m. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
 - o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Perdagangan

- 1) Bidang Usaha Perdagangan tugas mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang usaha perdagangan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Usaha Perdagangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Bina Usaha Perdagangan;
 - c. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha dan sarana perdagangan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang bina usaha dan sarana perdagangan;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang bina usaha perdagangan;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan neraca kegiatan usaha dan sarana perdagangan,
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha perdagangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Tugas Seksi Pengadaan dan Penyaluran

Seksi Pengadaan dan Penyaluran, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan, pengawasan serta pengembangan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- c. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan dan penyaluran barang;
- d. Mengumpulkan bahan peningkatan kerjasama antar daerah dan dunia usaha di bidang kegiatan perdagangan dalam negeri;
- e. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

f. Tugas Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan

Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
- b. Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha dan sarana Perdagangan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang usaha dan sarana perdagangan;

- e. Mengumpulkan - bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang usaha dan sarana perdagangan meliputi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- f. Mengumpulkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi perijinan di bidang usaha dan sarana perdagangan;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan sarana perdagangan;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

g. Tugas Seksi Pembinaan dan Promosi

Seksi Pembinaan dan Promosi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Promosi;
- b. Mengumpulkan bahan, pengolahan data penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan dan promosi; Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan promosi perdagangan;
- c. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan dan promosi perdagangan;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pembinaan dan promosi perdagangan;
- e. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan promosi perdagangan;
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

h. Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen

- 1) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas-tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Kemetrolagian dan Perlindungan konsumen;
 - b. Penyusunan rencana di bidang kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - c. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - d. Pelaksanaan pendataan, pembinaan, pengawasan dan penyidikan terkait kemetrolagian;
 - e. Penyiapan sumber daya manusia sarana pelayanan dan prasarana kemetrolagian;
 - f. Pelaksanaan optimalisasi pos ukur ulang dalam rangka menciptakan pasar tertip ukur;
 - g. Pembinaan terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Tugas Seksi Metrologi

Seksi Metrologi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Metrologi;
- b. Menyusun rencana seksi kemetrologian sesuai dengan rencana Dinas;
- c. Melaksanakan pendataan potensi alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- d. Melaksanakan pembinaan kemetrologian;
- e. Melaksanakan pemantauan evaluasi, pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal;
- f. Merencanakan pengembangan SDM, sarana dan prasarana pelayanan kemetrologian;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi metrologi legal;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- i. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

j. Tugas Seksi Pengawasan Pangan Beredar

Seksi Pengawasan Pangan Beredar, mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan Pangan Beredar;
- b. Menyusun rencana seksi pengawasan barang beredar sesuai dengan rencana kerja Dinas,
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar produk perdagangan umum bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan laporan di seksi pengawasan barang beredar;

- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan barang beredar;
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

k. Tugas Seksi Perlindungan Konsumen,

Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. menyusun rencana seksi ketataniagaan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- c. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang, perlindungan konsumen;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang perlindungan konsumen;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemetropologian;
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

I. Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Pengelolaan Pasar

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengelolaan Pasar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pengelolaan pasar;
 - b. Pengoordinasian tugas dan pelaksanaan program kepada bawahan agar penyelesaian sesuai dengan ketentuan;
 - c. Pemberian petunjuk, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal sesuai tujuan dan sasaran yang ditentukan;
 - d. Pemantapan dan pengawasan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan untuk bias, dipertanggung jawabkan secara benar;
 - e. Pelaksanaan evaluasi hasil program kerja yang dilaksanakan untuk bias dipertanggung jawabkan secara benar;
 - f. Pengoordinasian laporan, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari bawahan sebagai bentuk monitoring.
 - g. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar untuk dasar pelaksanaan tugas
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan kelompok-kelompok tertentu dalam usaha peningkatan kualitas pengelolaan pasar pemerintah daerah.
 - i. Penyusunan pertimbangan dalam kaitannya pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi kepada atasan terkait.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Tugas Seksi Retribusi

Seksi Retribusi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Retribusi;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan target pemasukan pendapatan dan pelaksanaannya;
- c. Mengumpulkan bahan pelaksanaan optimalisasi peningkatan pajak daerah dan retribusi pasar daerah;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi pasar daerah;
- e. Mengumpulkan bahan laporan dan penyetoran basil penagihan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi pasar daerah;
- f. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi pasar daerah serta. Pengeluaran kertas berharga;
- g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

n. Tugas Seksi Retribusi

Seksi Ketertiban Pasar, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketertiban Pasar;
- b. Melaksanakan penertiban terhadap pedagang yang berada dilingkungan Kawasan Pasar Daerah;
- c. Melaksanakan penataan pedagang yang disesuaikan dengan jenis dagangannya;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan dan pemantauan atas pungutan retribusi pasar daerah;
- e. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas dilapangan;

- f. Membuat rekomendasi perijinan sewa tanah dan bangunan dilingkungan pasar daerah;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan dan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pasar daerah;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan sistem Pengendalian Intern (SPI)
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

o. Tugas Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan, mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
- b. Mengumpulkan bahan koordinasi kegiatan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan dan kawasan daerah pasar;
- c. Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan saluran air, kios, los serta penerangan di lingkungan dan kawasan pasar daerah;
- d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah;
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Sumber Daya Dinas Perdagangan terdiri dari :

1. Seorang Pejabat Eselon II sebagai Kepala Dinas;
2. 4 (empat) Pejabat Eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang
3. 11 (empat) Pejabat Kepala seksi Eselon IV;
4. 29 (Dua Puluh Sembilan) Kepala Pasar se- Kabupaten Bangkalan;
5. Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 untuk PNS berjumlah 323, sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 532 Orang:

Tabel 1

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS	THL
1	S2	7	-
2	S1	102	-
3	D4	-	-
4	D3	3	-
5	D2	-	-
6	D1	-	-
7	SLTA	179	-
8	SLTP	27	-
9	SD	5	-
	Jumlah	323	532

Tabel 2

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama Mada (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	1

	Jumlah	2
2	Penata Tk I (III/d)	8
	Penata (III/c)	33
	Penata Muda TK I (III/b)	28
	Penata Muda (III/a)	58
	Jumlah	127
3	Pengatur TK I (II/d)	7
	Pengatur (II/c)	82
	Pengatur Muda TK I (II/b)	70
	Pengatur Muda (II/a)	26
	Jumlah	185
4	Juru TK I (I/d)	1
	Juru (I/c)	7
	Juru Muda TK I (I/b)	1
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	9
	Jumlah Total	323

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah terbesar personil PNS yang ada adalah untuk Golongan II yaitu sebanyak 185 orang sedangkan yang terendah yaitu golongan I yaitu sebanyak 9 orang.

Kompetensi personil yang ada tergambar dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masing-masing pegawai. Dari keseluruhan Pegawai Negeri di Dinas Perdagangan masih banyak PNS yang berlatar belakang pendidikan SLTA dan SMP yaitu sekitar 60 % dibandingkan yang berlatar pendidikan S1 yaitu sebesar 40 %. Hal ini membuktikan bahwa kualitas SDM yang ada pada Dinas Perdagangan masih kurang dan perlu untuk lebih ditingkatkan kompetensinya baik kompetensi akademik maupun kompetensi teknisnya.

Tabel 3
Data Jumlah Pasar Yang Dikelola
Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

NO	NAMA PASAR	LOKASI	KONDISI
1	2	3	
1	PASAR KLAMPIS	KECAMATAN KLAMPIS	BAIK
2	PASAR BLEGA	KECAMATAN BLEGA	BAIK
3	PASAR TANAH MERAH	KECAMATAN TANAH MERAH	SEDANG
4	PASAR KEDUNGUNG	KECAMATAN KEDUNGUNG	SEDANG
5	PASAR MODUNG	KECAMATAN MODUNG	SEDANG
6	PASAR LANGKAP	KECAMATAN BURNEH	SEDANG
7	PASAR DUWA' BUTER	KECAMATAN MODUNG	BAIK
8	PASAR AROSBAYA	KECAMATAN AROSBAYA	BAIK
9	PASAR SEPULU	KECAMATAN SEPULU	BAIK
10	PASAR SUKOLILO	KECAMATAN LABANG	SEDANG
11	PASAR SOCAH	KECAMATAN SOCAH	SEDANG
12	PASAR KI LEMAH DUWUR	KECAMATAN BANGKALAN	BAIK
13	PASAR KWANYAR	KECAMATAN KWANYAR	SEDANG
14	PASAR TONA'AN	KECAMATAN BURNEH	BAIK
15	PASAR CAMPOR	KECAMATAN KWANYAR	SEDANG
16	PASAR LABANG	KECAMATAN LABANG	SEDANG
17	PASAR JADDIH	KECAMATAN SOCAH	SEDANG
18	PASAR PATEMON	KECAMATAN TANAHMERAH	SEDANG
19	PASAR GALIS	KECAMATAN GALIS	BAIK
20	PASAR TANJUNG BUMI	KECAMATAN TANJUNG BUMI	BAIK
21	PASAR KAMAL	KECAMATAN KAMAL	BAIK
22	PASAR SENINAN	KECAMATAN BANGKALAN	BAIK
23	PASAR DUPOK	KECAMATAN KOKOP	SEDANG
24	PASAR KOMBANGAN	KECAMATAN GEGER	SEDANG

25	PASAR LOMAER	KECAMATAN BLEGA	SEDANG
26	PASAR DURJAN	KECAMATAN KOKOP	SEDANG
27	PASAR TRAGAH	KECAMATAN TRAGAH	SEDANG
28	PASAR BANCARAN	KECAMATAN BANGKALAN	BAIK
29	PASAR KENCUR	KECAMATAN SOCAH	SEDANG

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor impor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2008-2012 seperti pada tabel berikut:

Potensi perdagangan

Potensi Perdagangan di Kabupaten Bangkalan bergeliat terjadi di kec kota bangkalan. di kecamatan kota Bangkalan terdapat 3 (tiga) simpul pertumbuhan ekonomi dengan di dominasi sektor perdagangan yang sangat potensial dan dapat di sebut sebagai kawasan segi tiga emas bangkalan

Simpul pertama adalah kelurahan mlajah di mana terdapat bangkalan plaza dan pasar ki lemah duwur merupakan pusat nya.

Simpul kedua dikelurahan bancaran dengan pasar sebagai pusatnya sementara simpul ketiga terdapat di desa martajesah dengan pesarean syaichona Muhammad cholil (wisata religi) sebagai pusatnya.

Pengembangan ketiga kawasan ini dimasa yang akan datang tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten bangkalan, tanpa meninggalkan pengembangan kawasan sekitar jembatan suramadu di kecamatan labang, kecamatan tragah, dan kecamatan burneh.

Sub sektor perdagangan terpetakan dalam kategori perdagangan besar, menengah dan kecil. Di kabupaten bangkalan dari ketiga kategori perdagangan kecil selalu mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini wajar mengingat aktivitas perdagangan di bangkalan masih dominan komoditas yang bersifat lokal ,seperti hasil makanan dan minuman olahan pertanian dan kerajinan kecil

Perkembangan perdagangan di kabupaten bangkalan yang dapat dilihat dari penertiban Surat Ijin Usaha Perdagangan yang di terbitkan sbb:

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2008-2016.

No.	Surat ijin perdag	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	TDI (Tanda Daftar Industri)	14	7	23	11	-	NA	NA	NA	NA
2	SIUP Besar	11	9	21	1	1	NA	NA	NA	NA
3	SIUP Menengah	39	27	34	16	28	NA	NA	NA	NA
4	SIUP Kecil	288	230	249	372	361	NA	NA	NA	NA

Ket : untuk tahun 2017 s/d sekarang untuk surat ijin usaha perdagangan sudah tidak lagi ditangani oleh Dinas perdagangan karena sudah pengurusan surat ijin usaha sudah dialihkan ke dinas Perijinan

Dan untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Pasar; *Pendapatan Retribusi*, Pendapatan sektor pasar Selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah naik 6 %. Pada tahun 2013 pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 4.402.384.818,83 menjadi Rp. 4.719.674.514 tahun 2018 hal ini dipengaruhi adanya kenaikan tarif retribusi pasar sampai tahun 2018 dan peningkatan volume pedagang khususnya banyaknya pedagang musiman dan perbaikan dan penambahan fasilitas berjualan.

1. Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan pasar diantaranya Pengangkutan sampah Pasar ke TPA dan pemeliharaan bangunan pasar termasuk didalamnya adanya pembangunan sarana prasarana pasar ; pembangunan baru kios, los, selokan dan halaman pasar.

2. Penertiban pedagang agar menempati area yang sudah disediakan dan pengurusan ijin sewa tempat di pasar yang dikelola Dinas Perdagangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Perangkat Daerah (PD) di beberapa daerah mengelola langsung aset yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Dalam ekana ini, pendapatan pengelolaan langsung disetor ke Kas Daerah kelemahan sekaligus tantangan yang dihadapi secara umum di Bangkalan menurut UaSRDP dalam pengelolaan instansi pemerintah adalah :

1. Perencanaan dengan menggunakan penganggaran khususnya pemeliharaan bangunan terkadang terkendala oleh alam sehingga apabila terdapat kondisi diluar prediksi sulit untuk bisa teratasi secara optimal padahal kebutuhan ini terkait dengan kepentingan pengguna pasar/masyarakat . Seringkali terjadi juga biaya operasi dan pemeliharaan aset yang disediakan tidak mencukupi atau tersedia dalam waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di banyak lokasi ini mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan dan memburuknya kondisi fisik aset.
2. Sulit merekrut tenaga profesional karena pengelola merupakan pegawai daerah yang digaji berdasarkan struktur penggajian yang berlaku umum di daerah tersebut, contohnya tenaga kebersihan
3. Masuknya ritel modern baik besar maupun kecil sangat mempengaruhi jumlah kunjungan pembeli ke pasar.
4. Potensi pengembangan aset investasi sangat bergantung pada potensi keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

Keunggulan sekaligus peluang antara lain:

1. Kebutuhan modal kerja operasional pasar dalam satu tahun anggaran lebih terjamin karena menjadi bagian dari APBD

2. Pengawasan karena merupakan asset daerah langsung berada dalam pengawasan pemerintah daerah bersama DPRD sehingga meminimalkan perpindahan asset investasi akibat kesalahan pengelolaan
3. Masih terbukanya pengembangan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pendanaan apakah melalui bantuan DAK, Koperasi dll.
4. Masih tersedianya ruang pengembangan wilayah pada daerah sekitar pasar Daerah, melalui perluasan kawasan dan relokasi disamping pengembangan kawasan pemukiman dll.
5. Pengembangan pendapatan pasar melalui space iklan dan parkir di area Pasar Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan selain menggali dari sumber lain juga menggunakan metode Analisis SWOT dalam mengidentifikasi Tantangan dan Peluang pengelolaan Pasar. Berikut Analisa SWOT Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan sbb :

a. Strenght (Kekuatan)

- Tersedianya struktur organisasi Dinas perdagangan yang memadai berdasarkan peraturan Daerah No 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perdagangan
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Dukungan anggaran yang memadai, bersumber dari dana APBD, APBD propinsi dan APBN.
- Dukungan kebijakan dan regulasi bidang perdagangan dari pemerintah.
- Adanya teknologi di Bidang Perdagangan yang memadai.
- Secara kuantitas jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan sampai sekarang mencapai 855 personil yang ditempatkan

guna menggali potensi di 29 Pasar dibawah Pengelolaan Dinas Perdagangan

- Wilayah Kabupaten Bangkalan dengan dioperasionalkannya Jembatan Suramadu merupakan pintu gerbang masuknya distribusi barang dan jasa dari wilayah Surabaya ke daerah-daerah di Madura memberi arti begitu dekatnya akses yang bisa dibangun diantara kedua daerah tersebut sangat menguntungkan Dinas Perdagangan dari segi peningkatan jumlah pembeli / konsumen dari luar kota Bangkalan yang berarti bisa menjadi jaminan minat pedagang yang besar untuk melakukan perniagaan.di pasar
- Sementara itu secara kuantitas terdapat 29 Pasar dalam Pengelolaan Dinas Perdagangan artinya Daya tampung area perniagaan sangat besar. Sumber pendapatan Dinas Perdagangan dari hasil retribusi pemakaian Kios/ toko dan penempatan Pk-5 pada areal perniagaan Pasar sangat besar.

b. Opportunity (Peluang)

- Tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang perdagangan.
- Permintaan pasar global yang meningkat.
- Terbentuknya peluang pasar dengan adanya Jembatan Suramadu.
- Belum terkelolanya pendapatan sektor parkir khususnya yang ada di dalam pasar sebagian besar belum terkelola dengan baik artinya apabila hal tersebut bisa secara optimal di kelola bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pasar.

c. Weakness (Kelemahan)

- Lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kecendrungan pola pikir parsial dalam pelaksanaan program.

- Rendahnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undang di bidang perdagangan.
- Masih kurang kondusifnya iklim usaha.
- Belum adanya Data Base Informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
- Secara Kualitas SDM Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan kurang berorientasi pada pelayanan hal ini bisa dimaklumi disebabkan minimnya dana pelatihan tentang pelayanan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Pemahaman tentang pentingnya kepuasan Pelanggan masih kurang.
- Infrastruktur Pasar masih kurang memadai Fasilitas Umum berupa Toilet pada beberapa pasar banyak yang rusak atau malah tidak ada, tempat informasi, tempat papan reklame, transportasi ke pasar kurang lancar hanya ada pada jam-jam tertentu, sementara isu keamanan masih saja jadi momok bagi pelanggan dari luar Madura.

d. Threats (Tantangan)

- Tuntutan persyaratan pasar global yang semakin ketat.
- Fungsinya kompeten dunia usaha serta dampak krisis ekonomi.
- Penyimpangan IPTEK dan resiko kegagalan penerapan IPTEK bagi masyarakat.
- Mampukah kita bersaing dengan bentuk-bentuk pasar modern dalam beberapa tahun ke depan ? bagaimana menjawab tantangan itu ! salah satu usaha menjawab tantangan tersebut adalah dengan penyerdehanaan birokrasi dan retribusi bersaing disamping menjaga tingkat keamanan dan kenyamanan.
- Namun perlu disadari betapapun baiknya sistem di dalam pasar tidak akan bisa terlepas dari faktor ketersediaan sarana transportasi. Artinya membangun kerjasama / berkoordinasi

dengan pihak terkait dalam penyediaan sarana transportasi yang lebih baik dan berkoordinasi dengan bagian hukum dalam pemberian jaminan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa –sengketa dipasar. .

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 5 tahun terakhir

NO	Indikator Kinerja aspek Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Tersedianya Kendaraan Dinas				3 Unit	5 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit			1 Unit		67	0	0	50	0
2	Tersedianya Penilaian dan perlengkapan kantor				19 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	4 Unit	65 Unit		2 Unit	34 Unit	21	167	0	5	87
3	Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100
4	Laporan keuangan akhir tahun				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100
5	Penunjang operasional SKPD				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100
6	Renja SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100
7	Terlaksananya penyelesaian permasalahan konsumen				4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			3 kali		1 kali	0	0	75	0	25
8	Terlaksananya pengawasan makan dan minum				18 kali	18 kali	18 Kali	17 kali	10 kali	4 kali	4 kali	3 kali	17 kali	4 kali	22	22	17	100	40
9	Terwujudnya standarisasi UTP				4 kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali			4 Kali		1 kali		100			25
10	Terlaksananya promosi produk produk unggulan daerah				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	100	100	100	200	100
11	Terlaksananya distri busi sembako				1 kali	1 kali	800 Paket	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	800 Paket	1 kali	1 kali	100	100	100	100	100
12	tersedianya kebutuhan harga bahan pokok dan harga stabil				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok		1 Dok	0	0	100	0	100
13	Meningkatnya pengetahuan pedagang sadina dan asongan				0	40 Orang	50 Orang	60 Orang	30 Orang	40 Orang	80 Orang	0 Orang	60 Orang	0 orang	0	200	0	100	0
14	Tersedianya realisasi kawasan pedagang aslinya dan asongan				80 Orang	0	0	0	0	80 Orang	0	0	0	20 Orang	100	0	0	0	100
15	Papan profil yg memuat tlg data psr daerah				9 Unit	5 Unit	0	0	0	9 unit	5 unit	0	0	0	100	100	0	0	100
17	Operasi pemberian pedagang & lelit lalu lintas				29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(10)	(13)	(20)	(21)	(22)
18	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemeliharaan kebersihan Pasar				29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	100	100	100	100	100
19	Cakupan Pasar (Fasilitas Perdagangan) yang dibertalangi				20 %	13.70 %	13.70 %	13.70 %	10.34 %	20.69 %	10.34 %	10.34 %	37.93 %	6.90 %	103	75	75	277	67
20	Cakupan Jumlah Pasar yang terpelihara dengan baik				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100
21	Terlaksananya pendataan terhadap produk rokok yang tidak dilekati pita cukai/ilegal						4 Kali	4 Kali	4 Kali			4 Kali	4 Kali	4 Kali			100	100	100

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD
Kabupaten Bangkalan

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun							Rata-rata Pertumbuhan	
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2013 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	420.000.000			190.265.700		372.575.350			190.265.700		89			100		152.566.425	140.110.263
2 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.252.000	109.855.300	9.859.600	16.002.200	256.942.200	39.752.000	109.855.000		16.002.200	251.197.600	86	100		100	98	88.182.260	104.701.700
PROGRAM PLENGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	1.975.000	700.000	2.000.000	2.498.200	2.500.000		700.000	2.000.000	100	100		100	100	1.935.000	1.924.550
2 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000	2.500.000	1.970.000	990.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000		990.000	1.997.500	100	100		100	100	1.992.000	1.996.876
PROGRAM PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SATUAN UNIT KERJA																	
1 Kegiatan Penunjang Operasional SKPD	6.501.845.050	7.237.557.050	6.620.057.050	6.462.054.700	8.394.879.850	6.469.107.517	7.221.868.763		6.400.173.986	8.138.820.892	99	100		99	97	7.043.278.740	1.057.442.790
2 Kegiatan Penyusunan evaluasi Renja SKPD		2.500.000	2.500.000	1.270.000	2.500.000		2.385.000		1.270.000	2.500.000	4DIV/01	95		100	100	2.192.500	2.045.667
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN																	
1 Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen					19.500.000					18.257.400					94	19.500.000	18.257.400
2 Kegiatan Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa					17.250.000					10.214.150					59	17.250.000	10.214.150
3 Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian Daerah					89.613.650					68.159.414					76	89.613.650	68.159.414
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EXPORT																	

Uraian *	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Puntualitas	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Kegiatan Pembangunan promosi perdagangan internasional					44.170.000					43.393.324					98	44.170.000	43.393.324
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI																	
1 Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk					50.000.000					47.717.800					95	50.000.000	47.717.800
2 Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan					6.432.000					5.821.500					91	6.432.000	5.821.500
PROGRAM PEMILIHAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN																	
1 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan																	
2 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan					148.411.600					134.933.600					91	148.411.600	134.933.600
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PASAR																	
1 Kegiatan Pembuatan Profil Kantor Pengelolaan Pasar		25.900.000														25.900.000	25.766.700
2 Penetapan di Lingkungan Pasar	76.112.000	78.506.000	42.285.200	35.615.900	44.021.400	75.155.900	78.079.900			35.492.500	43.482.611	99	99	100	99	55.309.960	58.052.726
3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Kebersihan Pasar	505.100.400	792.521.725	454.944.000	942.750.225	963.957.450	504.802.600	776.131.700			938.497.151	887.993.848	100	98	100	90	753.854.760	771.846.327
4 Revitalisasi Pasar Daerah																	
5 Operasional Maintenance (OM) Pasar	3.093.404.500	2.746.955.137	2.180.930.500	3.476.226.500	415.925.000	2.989.872.100	2.648.722.900			3.428.483.900	260.781.637	93	90	100	43	2.372.083.327	2.331.968.147
	1.323.960.000	1.590.889.600	1.379.373.300	2.157.213.800	1.755.944.000	1.309.021.400	1.541.486.300			2.071.831.000	1.568.738.650	90	97	98	91	1.643.482.140	1.630.719.413
PEMBERANTISAN BARANG KENA CUKAI ILLEGAL																	

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun							Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2013 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
1 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai rokok ilegal palsu atau tidak dilekati pita cukai dan diperedaran tempat penjualan eceran					230.000.000					143.142.000							

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi pelayanan pada Dinas Perdagangan banyak permasalahan – permasalahan dihadapi antara lain :

1. Efisiensi dan Efektifitas system distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting, masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengembangan jaringan informasi produk, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Kurangnya optimalnya evaluasi / pengelolaan PAD ; belum terealisasi program dan kegiatan yang mendukung disebabkan keterbatasan anggaran untuk Dinas Perdagangan
3. Meningkatkan tertib niaga, tertipukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
4. Penataan Pedagang kaki lima dan asongan dengan memfasilitasi lokasi usaha yang nyaman dan aman tertib dan indah karena pedagang kaki lima sebagai usaha kecil yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan luas kepadamasyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat
5. Sarana / prasarana dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
6. Kurangnya kesadaran pegawai terhadap tanggungjawab kebersihan di wilayah pasar masing-masing
7. Kurang tertibnya masyarakat pasar untuk mengurus ijin sewa; disebagian besar pasar pengurusan ijin perpanjangan masih sulit

teralisasi secara keseluruhan diakibatkan kesadaran pengguna disaat masa pemakaiannya habis terkesan mengesampingkan aturan yang ada. Alasan yang sering muncul yaitu tidak adanya dana dan waktu yang cukup.

8. Banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Didalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Visi Kepala Daerah adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL"**.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Perdagangan yang berfungsi sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan kebijakan Dinas perdagangan. Secara tegas kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan harus mampu mengarah pada visi yang telah ditetapkan.

Dari Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam misi Kabupaten Bangkalan yang makmur, mandiri dan agamis maka Bangkalan sebagai penghubung antara wilayah Surabaya dan Madura menjadi andalan pusat perekonomian Nasional mengoptimalkan potensi Kabupaten Bangkalan melalui pemangku kepentingan (Pemerintah-Masyarakat-Swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan Kota Metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan 2018-2023. Kabupaten Bangkalan yang berada di lokasi strategis, baik untuk lingkup regional yaitu sebagai salah satu pintu masuk dan keluar di wilayah pulau Madura karena lokasinya yang berada di perbatasan dekat dengan kota Surabaya. Faktor geografis tersebut telah mendorong kembalinya Kota Bangkalan untuk berperan sebagai "Pusat pertumbuhan ekonomi" serta sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditanggung oleh keberadaan sarana dan

prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani. Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Bangkalan sebagai sentral akhir dan transit yang berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan Visi ini mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005-2025. Sebagai motivasi utama bagi Pemerintah Kota Bangkalan untuk menentukan industri mana Kota Bangkalan dibangun dan sekaligus merupakan industri bersama Pemerintah Kota Bangkalan dengan seluruh perangkat Pemerintah yang berada dalam koordinasinya dalam upaya mereflesikan tujuan yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dirumuskan Visi Kota Bangkalan yaitu : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL"**

Untuk mewujudkan Visi Kota Bangkalan tersebut, maka dirumuskan Misi Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang professional dan Berintegritas Tinggi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Dari Visi, Misi Kabupaten Bangkalan diatasyang terkait dengan Tugas pokok dan Fungsi pada Dinas Perdagangan adalah Misi no. 3(Tiga) yang bertujuan Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Sasaran Kabupaten inilah yang menjadi visi dan misi yang Dinas Perdagangan pada kurun waktu 5(lima) tahun kedepan. Dalam mengemban misi :

“Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah”

Berdasarkan Visi Bupati Bangkalan **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”** apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perdagangan, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah terkait dengan kata kunci masyarakat yang semakin sejahtera, kemandirian daerah, dan peningkatan perekonomian yang mengedepankan Potensi yang berasal dari daerah Bangkalan dan sekitarnya. Hal ini merupakan peluang bagi usaha mandiri masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi-potensi yang berkembang sehingga menjadi lebih maju dan dapat bersaing dengan pasar-pasar modern.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

➤ Kementrian Perdagangan

1. Visi :

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat berkeadilan

2. Misi :

- a. Meningkatkan kinerja ekspor non migas secara berkuali
- b. Memperkuat pasar dalam negeri

- c. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi Nasional

3. Tujuan :

- a. Perbaikan IKM usaha perdagangan dalam negeri
- b. Peningkatan kerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
- c. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri
- d. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok

4. Sasaran dan Strategis

- a. Perbaikan IKM usaha perdagangan dalam negeri
 - ✓ Adalah membaiknya layanan perizinan dan non perizinan perbaikan layanan ini merupakan upaya mendukung penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif akhirnya dapat menguatkan pasar domestik
- b. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
 - ✓ Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif tiap tahunnya
 - ✓ Meningkatnya kontribusi PDRB Industri kreatif terhadap PDRB Nasional, sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional
- c. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri
 - ✓ Meningkatkan kesadaran konsumen akan baik dan kewajibannya menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang atau jasa dipasar dalam negeri
- d. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien
 - ✓ Peningkatan kinerja logistik Indonesia

- ✓ Penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistic yang mendukung
- e. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga

➤ **Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilaikeserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaranpelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstraPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenanganmasing-masing PD.

Terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur Memiliki Visi dan misi yaitu :

a. Visi

Jawa Timur sebagai pusat perdagangan terkemuka, berdayasaing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar distribusi promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
3. Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya

Dinas perdagangan Provinsi Jawa Timur sebelum era otonomisasi merupakan kantor wilayah dibawah kementrian

perindustrian dan perdagangan yang saat itu menjadi satu sajak 1996 ketika kedua kementerian terpisah, kantor wilayah perindustrian dan perdagangan tetap menyatu dan akhirnya ketika otonomisasi berlaku di Jawa Timur kemudian masuk dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan nama Dinas Perdagangan. Begitu pula struktur di Kabupaten Bangkalan sama seperti Provinsi setelah masuk dalam struktur pemerintah Jawa Timur Dinas ini pun harus melaksanakan agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Strategi pembangunan Jatim menekankan pada pemberdayaan sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan merupakan proses aktif upaya pembangunan diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat, Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditinggalkan kemampuannya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014, Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bangkalan adalah:

Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura untuk menjadikan kota Industri, pariwisata, dan jasa yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang religius dan berbudaya serta berazaskan pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan ini adalah untuk mewujudkan semua potensi, masalah, dan prospek pengembangan Kabupaten Bangkalan dalam konteks regional dan nasional.

A. PENGEMBANGAN WILAYAH DI DALAM RTRW

1. Kebijakan pengembangan wilayah, meliputi:
 - a. pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur sekaligus di Kabupaten Bangkalan;
 - b. peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.
- 1) Strategi untuk memantapkan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan, meliputi:
 - a. pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota;
 - b. pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan regional;
 - c. pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skala Nasional dan regional;
 - d. peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Bangkalan;
 - e. peningkatan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kabupaten dan antar perkotaan lainnya; dan
 - f. pengembangan kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN berbasis ekologi.
- 2) Strategi untuk meningkatkan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan, meliputi:
 - a. pemantapan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agrobisnis dan agroindustri di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan
 - c. pemantapan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri atas lembaga tani dan lembaga keuangan; dan

- d. pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan berbasis eco-region.

B. RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN

Dalam kerangka untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Kebijakan tata ruang melalui perwilayahan pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Hambatan antara daerah pusat dan daerah belakang
- b. Homogenitas atau kesamaan karakteristik wilayah.
- c. Kesamaan lingkungan yang membutuhkan penanganan lingkungan dalam bentuk terpadu.

Adanya konsep perwilayahan ini dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Konsep perwilayahan pembangunan bertujuan:

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam dan antar wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil.
- b. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat di setiap wilayah dan sub wilayah pembangunan.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah dan sub wilayah pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalannya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, polkam, sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang serta memperkuat perkembangan regional dan nasional.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang melalui program khusus dengan tetap memperhatikan

sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Rencana Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan

No	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)	Pusat Pengembangan	Kecamatan Pengaruhnya	Fungsi Utama
1	SSWP-1	Perkotaan Bangkalan	• Kecamatan Bangkalan • Kecamatan Burneh • Kecamatan Socah	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut dan Darat
2	SSWP-2	Perkotaan Labang	• Kecamatan Kamal • Kecamatan Labang • Kecamatan Kwanyar • Kecamatan Tragah	• Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut dan Darat • Pertanian • Perikanan
3	SSWP-3	Perkotaan Klampis	• Kecamatan Klampis • Kecamatan Sepulu • Kecamatan Arosbaya	• Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut • Perikanan • Pertanian
4	SSWP-4	Perkotaan Blega	• Kecamatan Konang • Kecamatan Blega • Kecamatan Modung	• Pertanian • Perikanan • Perkebunan
5	SSWP-5	Perkotaan Tanjungbuni	• Kecamatan Tanjungbuni • Kecamatan Kokop	• Pertanian • Perkebunan • Perikanan • Industri Kecil
6	SSWP-6	Perkotaan Tanah Merah	• Kecamatan tanah Merah • Kecamatan Geger • Kecamatan Galis	• Pertanian • Perkebunan • Kehutanan

Sumber : Review RTRW Kabupaten Bangkalan

➤ **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Bangkalan Untuk Perencanaan Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Bangkalan dikembangkan secara hirarkis sesuai dengan skala pelayanan yang diperuntukkan pada masing – masing kawasan. Pada kawasan ini dengan skala pelayanan regional terdapat beberapa lokasi kawasan yang direncanakan. Kawasan dengan skala regional terdapat beberapa lokasi kawasan yang direncanakan. Kawasan dengan skala regional ini antara lain adalah :

- ✓ Kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat dikawasan kaki Jembatan Suramadu di Kecamatan Labang, Sukolilo, Patemon, tanah merah merupakan kawasan yang akan berkembang pesat setelah pembukaan akses Jembatan Suramadu. Perencanaan Peruntukkan Kawasan ini adalah 40Ha. termasuk dalam wilayah pengembangan baik dari sisi ekonomi,
- ✓ Kawasan Perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Bangkalan yang terdiri dari pasar induk dan kawasan pertokoan serta mall. Kawasan ini memiliki luas 100Ha. Pembangunan pasar induk ini merupakan pasar dengan skala regional yang melayani lingkup Kabupaten Bangkalan.

Sementara untuk kawasan perdagangan dan jasa skala lokal akan dikembangkan sesuai dengan lokasi pusat kegiatan dimana kawasan perdagangan dan jasa yang direncanakan. Pada wilayah bukota Kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa yang direncanakan ditentukan memiliki skala pelayanan satu Kecamatan atau lebih dan selanjutnya pada pusat – pusat desa ditentukan memiliki skala pelayanan satu kecamatan atau lebih dan selanjutnya pada pusat – pusat desa ditentukan memiliki skala pelayanan sesuai dengan wilayah pelayanannya.

➤ **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009, RPJP Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Tahun 2018 – 2023 akan ditetapkan dikawasan strategis yang akan dilakukan KLHS. Beberapa isu Lingkungan yang terjadi pada kawasan strategis tersebut sebagai berikut:

1. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS)

Adanya ketimpangan antara Wilayah Gerbang Kertasusila Plus dan Madura mendorong Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk meningkatkan aksesibilitas dengan dibangunnya Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) yang diharapkan dapat dapat mengurangi ketertinggalan Wilayah Madura dari segi ekonomi, pembangunan fisik, Social dan Budaya.

Pembangunan Jembatan ini akan bermanfaat besar khususnya bagi masyarakat Pulau Madura karena dapat langsung menghubungkan wilayahnya dengan ibu kota Propensi Jawa Timur yaitu Surabaya. Sehingga potensi Pulau Madura dapat lebih tergali dan kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Jembatan Suramadu merupakan terobosan teknologi di Indonesia khususnya dalam bidang rekayasa bangunan jembatan. Jembatan ini akan menjadi jembatan terbesar, terpanjang dan dari segi teknologi rekayasa bangunan akan menjadi termodern di Indonesia.

Tujuan utama pembangunan Jembatan ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Propensi Jawa Timur khususnya Madura untuk menyediakan fasilitas transportasi yang handal. Adanya Jembatan Suramadu ini diharapkan nantinya akan menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat industry untuk mengembangkan potensi bisnis daerah secara regional dan Internasional. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Pulau Madura.

Dengan beroperasinya Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu), maka Kawasan Kaki Jembatan Suramadura (KKJS) akan diharapkan sebagai sebuah kawasan yang dapat diandalkan untuk informasi ekonomi, budaya dan sains-teknologi dalam lingkup Propinsi Jawa Timur khususnya dan Indonesia Bagian Timur khususnya. Karena pembangunan perencanaan penataan kawasan kaki Jembatan ini merupakan investasi jangka panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar, maka perlu dilakukan penataan, pengkajian dan perencanaan yang menunjang. Dikarenakan hal ini akan membawa dampak yang besar pada kedua kaki – kaki jembatan baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi lingkungan fisiknya. Oleh karena itu diperluakan Kajian – kajian untuk menetralsisir timbulnya dampak tersebut. Rencana kaki Jembatan Suramadu, direncanakan bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan industri. Beberapa isu strategis pengembang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu tersebut adalah :

- a. Kondisi fisik dan kemampuan lahan kawasan kaki jembatan Suramadu didalam mendukung kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut.
- b. Proses Pengadaan dan Pembebasan Lahan. Pengembangan kawasan Kaki Jembatan Suramadu diperlukan perencanaan yang tepat terutama menyangkut pembebasan lahan. Hal ini terkait dengan masalah penggunaan lahan., status dan harga tanah.
- c. Kepastian investor
- d. Kepastian mengenai prasarana pendukung pengembangan kawasan tersebut
- e. Adanya rencana pencampuran pola penggunaan lahan (mix used) untuk kegiatan industri, perdagangan / jasa dan perumahan memerlukan upaya pengendalian yang ketat

sehingga diperlukan badan / lembaga yang secara intensif mengelola kawasan tersebut

- f. Aspek social budaya pada kawasan sekitar kaki jembatan suramadu
 - a. pada kawasan sekitar kawasan pelabuhan

2. Rencana Pembangunan Pelabuhan Madura Industrial Seaport City – Socah

Rencana pemerintah untuk memuat terminal Petikemas di Pulau Madura sebagai perluasan dari terminal peti kemas di Surabaya juga akan mempengaruhi perkembangan disektor ekonomi dan transportasi, utama pelabuhan laut di Pulau Madura Pengembangan wilayah Socah untuk pembangunan pelabuhan baru yang akan dikembangkan oleh salah satu perusahaan swasta Madura Industrial Seaport City (MISI) yang merupakan proyek jangka panjang PT Lamicitra Nusantara, Tbk salah satu investor / pengembangan yang berencana membangun Pelabuhan khusus PT. Madura Industrial Seaport City. Proyek Pembangunan Pelabuhan Khusus Nasional beserta Fasilitasnya PT. Madura Industrial Seaport City telah direncanakan di Tanjung Junganyar, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan titik koordinat geografis pelabuhan khusus seluas ± 100 Ha.

Rencana Kawasan pelabuhan khusus Socah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri pergudangan dan jasa transportasi. Sebagai prasarana pendukung rencana pengembangan wilayah ini yang begitu besar. Rencana usaha pembangunan pelabuhan khusus Nasional dan fasilitasnya di Tanjung junganyar ini direncanakan pada lahan $967.409,3m^2$. Beberapa isu strategis bagi Pembangunan Pelabuhan Madura Industrial Seaport City – Socah adalah :

- a. Untuk mendukung pengembangan KKJS
- b. Kondisi fisik dan kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan yang akan dikembangkan kawasan pelabuhan tersebut
- c. Pengadaan lahan melalui proses reklamasi pantai perlu memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi
- d. Kepastian mengenai prasarana pendukung pengembangan kawasan tersebut
- e. Aspek sosial budaya pada kawasan sekitar kawasan pelabuhan

Dari uraian tersebut diatas terkait Talaah Rancana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengambil peran untuk menyiapkan regulasi terhadap pengembangan kawasan Perindustrian dan Perdagangan dan mengambil langkah strategis sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi dan Kajian-kajian diatas secara bersama Dinas Perdagangan menentukan isu-isu strategis sbb:

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya produk unggulan untuk Mengembangkan peran dunia usaha dan investasi
3. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri

4. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
5. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakartapameran-pameran lainnya
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTDMetrologi Legal
9. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan nonfisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan PAD maupun keamanan dan kenyamanan di dalam lingkungan pasar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah yaitu **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL** dan misinya, "Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah", untuk mencapai itu Dinas Perdagangan menetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas Perdagangan

agar tujuan ini dapat dicapai maka laju pertumbuhan masing-masing sektor harus selalu ditingkatkan secara signifikan melebihi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai serta diharapkan memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai, Dinas Perdagangan mempunyai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretarian

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH										SASARAN										STRATEGI	KEBUJAKAN	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET						TRANSISI 2024						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024											
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19			
Meningkatkan produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDGB sektor perdagangan	4.62	4.98	5.02	5.08	5.15	5.22	5.29	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	34,48		Meningkatkan an pengembilan dan pengelolaan pasar	Merevitalisasi pasar daerah PENGEMBANGAN PASAR	PROGRAM PENINGKATAN			
										80	81	82	83	84	84		Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar	Memberikan Keamanan dan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli sehingga dapat meningkatkan kepuasan bagi pengunjung pasar	PROGRAM PENGELOLAAN PASAR			
Program Prioritas		: Merevitalisasi pasar rakyat dan pemanfaatan cold storage PPI sesuai kebutuhan																				

Bangkalan,

2019



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

5.1. Strategi (Rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai)

Strategi yang di tempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur yang maju dan modern untuk menunjang sektor Perdagangan dan Pasar.
2. Mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional sebagai early warning system pengendali fluktuasi harga komoditas
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar
4. Mengoptimalkan tersedianya SDM dan alat standart kemetrolagian
5. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian rencana dan program untuk memperjelas strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan pencapaian sasaran pada misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat
2. Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor serta Penguatan aktifitas stabilisasi harga komoditas
3. Memberikan Keamanan dan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli sehingga dapat meningkatkan kepuasan bagi pengunjung pasar
4. Memprioritaskan pelayanan tera / tera ulang pada pelaku usaha yang berdampak kepada kepentingan konsumen / masyarakat
5. Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

VISI	: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL			
MISI 3	: MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN TATA KELOLA PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH			
TUJUAN 4	: MENOPTIMALKAN FASILITASI AKTIVITAS EKONOMI KERAKYATAN DAN SOSIAL BUDAYA BERBASIS POTENSI LOKAL			
SASARAN 7	: MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KOPERASI, USAHA MIKRO INDUSTRI DAN PERDAGANGAN			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1. Meningkatkan layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Meningkatkan infrastruktur yang maju dan modern untuk menunjang sektor Perdagangan dan Pasar.	1.1	Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat
			2.1	Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor serta Penguatan aktifitas stabilisasi harga komoditas
		1.2 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pasar	1.2	Merevitalisasi pasar daerah
			2.2	Memprioritaskan pelayanan tera / tera ulang pada pelaku usaha yang berdampak kepada kepentingan konsumen /
	2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	3.1 Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah	3.1	Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada BAB ini akan menguraikan sejumlah program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Sebagai informasi lanjutan atas kebijakan yang telah dirumuskan, berikut akan dikembangkan rumus sasaran kebijakan serta program pengembangan umum yang dipandang relevan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan untuk 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023).

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL**
 - a. Kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau di peredaran atau tempat penjual eceran
2. **PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG INFRASTRUKTUR**
 - a. Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan pasar
3. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PASAR**
 - a. Kegiatan Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
4. **PROGRAM PENGELOLAAN PASAR**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
 - b. Kegiatan Pengelolaan Retribusi Pasar
 - c. Kegiatan Pengelolaan Penertiban Pasar
5. **PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**
 - a. Kegiatan Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat

6. PROGRAM USAHA PERDAGANGAN

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Sarana Perdagangan
- b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Promosi
- c. Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Usaha Perdagangan

7. PROGRAM METEOROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- a. Kegiatan Pengelolaan Kemetrolagian
- b. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen
- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa
- d. Kegiatan Penyediaan sarana ddalam mendukung pembentukan unit metrologi legal

8. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN

- a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- e. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
- f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
- g. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Informasi PD
- h. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
- i. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- j. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT																												
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT/ OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Realisasi Perencanaan (2018)	2019					2020					2021					2022					Kendali Efektifitas pada akhir periode (Rencana FY)	Dana Tercapai per Perencanaan	Unit
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Meningkatnya Produktifitas Perdagangan	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase lokasi perdagangan terakut barang kaku yang terjangkau	23.21	34.20	175.000.000.00	25.52	175.487.500.00	26.53	193.894.375.21	27.29	193.894.375.21	28.13	208.002.215.14	29.00	208.002.215.14	30.00	208.002.215.14	31.00	208.002.215.14	32.00	208.002.215.14	33.00	208.002.215.14		
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase lokasi perdagangan terakut barang kaku yang terjangkau	4.14	17.42	175.000.000.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00	17.42	175.487.500.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	6.80	6.80	1.800.000.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00	6.80	2.485.725.000.00
			3.06.23.06	PROGRAM PEMERINTARAN BARANG KEMERCUA LUGAL	Persentase pasar yang diperbaiki	2.00	1.60.00	1.800.000.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00	2.10.00	2.485.725.000.00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDAMIAN										Unit Kerja PD PeningkatGandab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD
						1 paket	254,321,075.00	1 paket	262,324,054.24	1 paket	271,021,081.09	1 paket	292,598,160.89	1 paket	318,151,042.02			
			Pengelolaan Rertribusi Pasar	Jumlah sarana pengelolaan rertribusi pasar yang dilaksanakan	29 pasar	1 paket	254,321,075.00	1 paket	262,324,054.24	1 paket	271,021,081.09	1 paket	292,598,160.89	1 paket	318,151,042.02	5 paket	1,399,286,913.91	
			Pengelolaan Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban & pelaksanaan pemutakhiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	29 pasar	2 Paket	51,655,300.00	2 Paket	67,897,000.00	2 Paket	70,239,095.76	2 Paket	75,712,662.09	2 Paket	82,473,545.32	10 Paket	348,078,803.17	
		Persentase jumlah UTPP yang di tera / tera ulang	PROGRAM METEOROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTPP dalam rangka perlindungan konsumen	100	100	1,742,250,000.00	100	1,530,359,125.00	100	1,578,151,888.00	100	1,691,122,733.55	100	1,899,275,308.21	100	8,349,159,054.83	
			Pengelolaan Kemetriologi	Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetriologi yang dilaksanakan	17 kali	1 Dokumen	191,365,250.00	1 dokumen	176,700,000.00	1 dokumen	182,897,794.53	1 dokumen	196,251,127.06	1 dokumen	212,740,354.44	5 dokumen	899,865,336.94	
			Peningkatan Perlindungan Konsumen	Jumlah/persen pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	1 kali	100 orang	25,000,000.00	120 orang	25,212,500.00	130 orang	25,987,224.32	140 orang	27,655,390.88	140 orang	29,717,544.31	140 orang	133,573,669.59	
			Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa	Jumlah/persen temuan yang ditindaklanjuti	12 kali	60 pekelu usaha	17,396,825.00	65 pekelu usaha	17,396,825.00	65 pekelu usaha	17,391,164.78	70 pekelu usaha	19,002,069.71	80 pekelu usaha	20,505,105.57	80 pekelu usaha	82,165,825.98	
			Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	Jumlah tersedianya alat-alat pendukung metrologi	1 kali	1 paket	1,508,633,750.00	1 paket	1,311,050,000.00	1 paket	1,351,335,664.45	1 paket	1,438,132,325.89	1 paket	1,546,312,303.89	5 paket	7,154,484,544.23	
Terpenulisi Pelayanan Internal Layanan Kesejahteraan			Program Pelayanan Kesejahteraan	Persentase terpenulisan layanan Kesejahteraan	100	100	11,859,843,825.00	100	11,881,359,765.00	100	12,225,348,724.02	100	13,011,586,378.38	100	13,981,678,135.48	100	62,346,254,325.96	
			Penyediaan Barang dan Jasa Perantara	Jumlah jenis barang perantara yang disediakan	1 paket	8 Jenis	11,228,750,000.00	8 Jenis	11,240,438,450.00	8 Jenis	11,595,832,242.51	8 Jenis	12,329,993,834.39	8 Jenis	13,248,913,542.67	8 Jenis	59,633,827,469.57	
				Jumlah jenis jasa perantara yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	330,245,825.00	8 Jenis	333,254,615.00	8 Jenis	343,494,791.65	8 Jenis	365,557,556.80	8 Jenis	392,891,538.38	8 Jenis	1,795,364,326.63	
			Kegiatan Kedisnasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	29 kali	29 kali	10,000,000.00	29 kali	10,885,000.00	29 kali	10,394,899.73	29 kali	11,062,556.35	29 kali	11,887,017.72	29 kali	53,426,483.80	
				Jumlah pelayanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	20 kali	20 kali	50,000,000.00	20 kali	50,425,000.00	20 kali	51,974,448.63	20 kali	55,312,781.77	20 kali	59,435,086.61	20 kali	267,147,316.91	
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyaluran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	5,000,000.00	14 Dokumen	5,000,000.00	14 Dokumen	5,000,000.00	14 Dokumen	5,000,000.00	14 Dokumen	5,000,000.00	50 dokumen	20,000,000.00	
			Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	1 paket	26 jenis	95,000,000.00	2 jenis	80,807,500.00	2 jenis	83,290,535.61	2 jenis	88,640,309.02	2 jenis	95,346,423.86	34 jenis	442,684,795.08	
				Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara		1 unit	15,000,000.00	1 unit	15,000,000.00	1 unit	15,460,916.80	1 unit	16,463,975.74	1 unit	17,680,244.51	4 unit	64,595,337.04	
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang diduduki		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan n (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Pemerintahan	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD			
				Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	31 jenis	1 jenis	25.000.000.00	1 jenis	25.212.500.00	1 jenis	25.987.224.32	1 jenis	27.656.360.88	1 jenis	29.717.544.31	5 jenis	133.573.659.50		
	0 06 16 06		Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pelatihan dan kelempahan aparatur yang diadakan	NA	114 buah	40.200.000.00	114 buah	40.541.700.00	114 buah	41.787.456.70	114 buah	44.471.476.54	114 buah	47.785.811.24	570 buah	214.786.444.48		
	0 06 16 07		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sos ialisasi/seminar	NA	2 orang	20.450.000.00	2 orang	10.085.000.00	2 orang	10.384.889.73	2 orang	11.092.556.35	2 orang	11.887.017.72	10 orang	63.876.463.80		
	0 06 16 08		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	1 dokumen	4 dokumen	25.000.000.00	4 dokumen	10.212.500.00	5 dokumen	10.987.224.32	4 dokumen	12.656.360.88	5 dokumen	14.717.544.31	22 dokumen	73.573.659.50		
				Jumlah dokumen Penganggaran PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000.00	2 dokumen	5.042.500.00	2 dokumen	5.197.444.86	2 dokumen	5.531.278.18	2 dokumen	5.943.508.86	10 dokumen	28.714.731.90		
				Jumlah data dan informasi PD				3 data	5.000.000.00	3 data	5.000.000.00	3 data	5.000.000.00	3 data	5.000.000.00	12 data	20.000.000.00		
	0 06 16 09		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan trivulan dan semesteran movev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	9 laporan	8 laporan	5.000.000.00	12 laporan	5.042.500.00	12 laporan	5.197.444.86	12 laporan	5.531.278.18	12 laporan	5.943.508.86	58 laporan	28.714.731.90		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan kegiatan realisasi kinerja PD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5.000.000.00	1 dokumen	5.042.500.00	1 dokumen	5.197.444.86	1 dokumen	5.531.278.18	1 dokumen	5.943.508.86	5 dokumen	28.714.731.90		
	0 06 16 10		Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/ akhir tahun	1 laporan	1 laporan	5.000.000.00									1 laporan	5.000.000.00		
				Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/tr ivulan/semesteran				76 laporan	2.542.500.00	76 laporan	2.697.444.86	76 laporan	3.031.278.18	76 laporan	3.443.508.86	305 laporan	11.714.732.04		
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 dok	2.500.000.00	1 dok	2.500.000.00	1 dok	2.500.000.00	1 dok	2.500.000.00	5 dok	10.000.000.00		
	0 06 16 11		Kegiatan Fasilitas Peningkatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Hari Nasional dan Hari Besar lainnya	Jumlah kegiatan Peningatan hari/jadi dan hari besar yang difasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000.00	2 kegiatan	15.127.500.00	2 kegiatan	15.592.334.59	2 kegiatan	16.583.834.53	2 kegiatan	17.830.526.58	9 kegiatan	90.144.195.70		
JUMLAH TOTAL							42.598.077.000		22.494.367.605.49		23.183.569.718.92		24.674.785.250.56		26.513.727.945.79		138.486.327.534.76		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan 2019-2023 dengan Visi dan Misi merupakan arah perjalanan kinerja selama 5(lima) tahun mendatang. Keberhasilan Perencanaan dan Strategi suatu instansi akan lebih mudah diukur apabila terdapat kesepakatan alat ukur yang digunakan. Alat ukur keberhasilan biasa disebut indikator kinerja.

Indikator Kinerja bisa secara kualitatif dan kuantitatif bergantung kepada jenis data yang digunakan. Ada tiga Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD meliputi :

1. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
2. Indikator yang dikembangkan SKPD secara Mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tupoksi PD bersangkutan.
3. Indikator Millenium Goals(MDGs) ataupun Indikator lain yang diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tupoksi PD bersangkutan.

Untuk Dinas Perdagangan kabupaten Bangkalan menggunakan Indikator yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bangkalan untuk Dinas Perdagangan yaitu "

1. Persentase infrastruktur perdagangan yang layak fungsi
2. Nilai SKM terhadap layanan pasar
3. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri
4. Persentase jumlah UTTP yang di tera / tera ulang
5. Indeks Kepuasan Internal layanan kesekretariatan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	34.5
2	Nilai SKM terhadap layanan pasar	80	80	81	82	83	84	84

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (renstra) PD Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 diharapkan menjadi pedoman pula bagi penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran PD (RKA-PD), penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-PD).

Renstra PD Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan ini di mungkinkan dapat direvisi dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah.

Keberhasilan program dan kegiatan urusan sangat tergantung kepada komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis, konsisten dalam kebijakan, dan kontinuitas dalam pelaksanaan dan penganggaran dengan memberikan pelayanan